

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
APARATUR YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DI KABUPATEN BOYOLALI.**

SUGITO

NPM. 15111013

ABSTRACT

This research gave a description on the implementation of supervision conducted by The Regional House of Representatives (DPRD) on The Regional Government in order to develop the implementation of a proportional supervision by DPRD on the Regional Government, therefore the good governance can be embodied.

Background: the background of the research focus is malfunction of the supervision of DPRD on the Regional Leader along with the apparatuses causes the proliferation of deviating behavior by the regional in the forms of unclean actions and full of corruption, collusion and nepotism (known as KKN). The centralization of power between the central government and the regional government which is full of KKN causes a prolonged multi-dimensional crisis.

This research is a juridical normative research. The selected location is in DPRD of Boyolali Regency. The characteristics of this research is descriptive that according to Soerjono Soekamto is "a research that provides an initial data as carefully as possible about human, condition or other symptoms". Object of this research is The Supervisory Function of The Regional House of Representatives on The Regional Government in Creating A Clean Government Which is Free from Corruption, Collusion and Nepotism in Boyolali Regency. In this research, the writer used a qualitative method.

The results of the research showed that the implementation of the supervision conducted by DPRD on the Regional Government had tasks according to their field, therefore, the main task and function among the members in conducting the supervision task had been suitable with the code of conduct Number 1 of 2014 of DPRD of Boyolali Regency. The supervision is closely related to supremacy, therefore it needs a support pillar that covers a system of regulation, the legal implementation system, the legal supremacy officers, and the judiciary system. The decision whether to accept or to reject is appropriate to the provision of article 6 paragraph (4) of the Government Regulation Number 15 of 2015 that is considered as accepted. The main supervision should be based on the implementation of APBD (the Regional Budget) in which it becomes the responsibility of supervision by DPRD. The obstacles faced by DPRD of Boyolali Regency in implementing the supervisory function on the Regional Government are: 1) lack of understanding on the position, the task and

the authority as well as the rights of DPRD; 2) the limitation in experience and or education in the legal and government field; 3) the limitation in understanding the structure of relation among the government institutions; and 4) the attachment of personal interest, group interest and political interest.

Keywords: the supervision of DPRD and good government

A. PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan dalam otonomi daerah yang mengakibatkan DPRD tidak berfungsi baik sebagai badan legislasi, pengawas maupun penyalur aspirasi masyarakat. Penyebabnya adalah Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Kepala Daerah hanya berkewajiban memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD. Dengan demikian, akuntabilitas Kepala Daerah terhadap rakyat daerah tidak tampak. Dampak lebih jauh demokratisasi pemerintahan daerah tidak berkembang karena fungsi DPRD sebagai lembaga penentu kebijakan dan pengawas dibatasi.

Dengan tidak berfungsinya pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah beserta perangkatnya mengakibatkan suburnya perilaku menyimpang dan aparatur daerah berupa tindakan yang tidak bersih dan penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sentralisasi kekuasaan antara pusat dan daerah yang penuh dengan KKN mengakibatkan knits' multi dimensional yang berkepanjangan.

Ketidakpuasan dan tuntutan untuk adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diakomodir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menertibkan ketetapan mengenai otonomi daerah yaitu TAP MPP No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pemberian

dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakekatnya tuntutan reformasi adalah dikembalikan hak-hak rakyat selaku pemegang kedaulatan agar pemerintah melaksanakan kewajibannya secara baik, benar dan bertanggung jawab. Dengan demikian DPRD selaku wakil rakyat seharusnya yang dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif atau pemerintah daerah agar dapat diwujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari KKN sehingga hak-hak rakyat dapat terpenuhi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari perkembangan peraturan tersebut, DPRD terjadi perubahan tugas DPRD dalam fungsi pengawasan sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Boyolali?

C. TUJUAN PENELITIAN

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dan guna mengembangkan pelaksanaan pengawasan yang proporsional oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah sehingga dapat diwujudkan ketata pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah di DPRD Kabupaten Boyolali.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan atau melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif menurut Soerjono Soekamto dalam buku metode penelitian hukum dijelaskan bahwa “penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”. Obyek penelitian adalah fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Boyolali.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari 41 anggota komisi DPRD dalam melakukan tugas pengawasan seperti yang diamanahkan oleh Tata Tertib No. 1 Tahun 2014 DPRD yakni masing-masing sesuai dengan tupoksinya menjalankan pengawasan dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015, dapatlah dijelaskan bahwa masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan bidang komisi dalam membidangi badan, dinas, kantor, unit-unit lain sebagai unsur pelaksana

pemerintah daerah sehingga tupoksi di antara masing-masing anggota baik dalam melakukan tugas di budgeting, legislasi, dan pengawasan telah sesuai dengan tata tertib No. 1 Tahun 2014 DPRD Kabupaten Boyolali dan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015.

Sebagaimana tertuang dalam peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Boyolali pengawasan terhadap 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain; 2) pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah; 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4) kebijakan Pemerintah Daerah, dan 5) pelaksanaan Kerjasama International di Daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan
Peraturan Perundang-Undangan Lain**

No	Tahun	Macam Kegiatan				
		Konj Komisi	Rapat Kerja Komisi	Rapat Kerja Gabungan Komisi	Penerimaan Aduan	Pembentukan Pansus
1.	2013	29	31	-	-	-
2.	2014	55	53	1	-	4
3.	2015	45	27	4	-	-
4.	2016	23	25	-	3	3

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Bupati dapat dilihat pada tabel berikut :

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Bupati

No	Tahun	Macam Kegiatan				
		Konj Komisi	Rapat Kerja Komisi	Rapat Kerja Gabungan Komisi	Penerimaan Aduan	Pembentukan Pansus
1.	2014	119	12	1	-	-
2.	2015	121	9	3	18	5
3.	2016	97	11	-	12	2

Pelaksanaan pengawasan supaya terwujud amanah otonomi daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya harus dijalankan secara profesional, sehingga timbulnya kendala tidak pada hakekat penyelenggaraan administrasi yang baik dalam otonomi daerah. Kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah antara lain : 1) kurangnya pemahaman tentang kedudukan, tugas dan wewenang serta hak-hak DPRD; 2) keterbatasan pengalaman dan atau pendidikan dalam bidang hukum dan pemerintahan; 3) terbatasnya pemahaman tentang struktur hubungan antar lembaga pemerintahan; dan 4) melekatnya kepentingan pribadi, kelompok dan politik.

F. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya sehingga tupoksi di antara masing-masing anggota baik dalam melakukan tugas di budgeting, legislasi, dan pengawasan telah sesuai dengan tata tertib No. 1 Tahun 2014 DPRD Kabupaten Boyolali. Pengawasan berkait erat dengan supremasi harus

sehingga dibutuhkan pilar penyangga yang meliputi sistem peraturan perundang-undangan, pelaksana hukumnya, penegak hukumnya, dan sistem peradilan. Keputusan menerima atau menolak maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 dianggap diterima. Dalam hal materi pengawasan yang utama seharusnya mendasarkan pada pelaksanaan APBD sedangkan yang menyangkut kinerja juga berkisar pada kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program-program yang menjadi tanggungjawab pengawasan DPRD.

2. Kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah antara lain : 1) kurangnya pemahaman tentang kedudukan, tugas dan wewenang serta hak-hak DPRD; 2) keterbatasan pengalaman dan atau pendidikan dalam bidang hukum dan pemerintahan; 3) terbatasnya pemahaman tentang struktur hubungan antar lembaga pemerintahan; dan 4) melekatnya kepentingan pribadi, kelompok dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, dkk, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Ali, Faied. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- API. 2001. *Panduan Parlemen Indonesia*. Yayasan API. Jakarta: Almanak Parpol Indonesia, Yayasan API Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*. UI Press, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Study Hukum.

- Bambang Yudoyono, 2001, *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bertens, *Etika Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 1997.
- Boboy, Max 1994, *DPR RI dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Budiardja. Miriam, 1996, *Demokrasi di Indonesia*, PT Graamedia Pustaka Umum, Jakarta.
- _____, 1996, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam & Ibrahim Ambong, 1993, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Crafindo Persada, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1997, *Teori Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cipto, Bambang, 1995, *DPR dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dann Suganda, 19981, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks: Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKIT)*. Indeks: Jakarta.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djiwandono, Soedjati J & TA, Legowo 1996, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- Duvereer. Maurice, 1968, *Sosiologie Politique*, edisi Indonesia Diterjemahkan oleh Dahiel Dhakidae, 1981, Rajawali Jakarta.
- Dwi Andayani, Budi Setyowati, 1997, *Posisi dan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Tesis, UI Press, Jakarta.
- Gafar, Afan 1999. *Politik Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handoyo, B. Hestu Citp, 1998, *Otonomi Daerah 1998 Otonomi Daerah*, Titik Berat dan Urusan Rumah Tangga Daerah. Untuk segera, Andi Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. LIPI: Jakarta.
- Hidayat Syarif, 2000, *Delima Otonomi Daerah*, Analisis, CSIS, Edisi Nomor 1 Tahun XXIX/2000.

- Hidayat, Syarif, 2000, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Hikam, Muhammad, A.S, 1999. *Politik Kewarganegaraan*. Erlangga: Jakarta
- Hoogerwerf A, 1985, *Politikologi*, Erlangga, Jakarta.
- Huntungon, Samuel P. & Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik*, Penerjemah, Sahat Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media: Malang.
- Kahoo, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., dkk, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta.
- Kantaprawira, Rusadi, 1990, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-ilmu Sosial*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1999, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Koswara, Ekom, 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1996, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. & Saragih, Bintatn R, 1995, *Ilmu Negara*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta.
- LAN & BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, LAN RI, Jakarta.
- Lawton, Alan and Aidan Rose, 1991, *Organization & Management in The Public Sector*, Pitman Publishing, London.
- Liang Gie, The, 1993, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Magenda, Burhan, (penyunting), 1992, *Sikap Politik Tiga Kontestan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mahfud. MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

- _____, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Mardiasno. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI: Yogyakarta.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan. 2005. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Muslimin, Amrah. 1986. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1988, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1997 a, *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1997 b, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1999, *Ilmu Pemerintahan*, Jurnal Kybernan, No. 3, MIP, Jakarta.
- _____, 2000 a-c, *Ilmu Pemerintahan Jilid I – V*. BKU IP, IPP, Jakarta.
- _____, *Kybernology*, PPS IP, IIP – UNPAD, IIP Jakarta.
- Nihin, R. A. Dj, 1999, *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah Menyongsong Millenium Ketiga*, Mardi Mulyo, Jakarta.
- Norton, Alan, 1994, *International Handbook of Local and Regional Government. A Corporative Analysis of Advanced Democracies*. Brookfield, USA; Edward Elgar Publishing Company.
- _____, & Peter Plastrik, 1997, *Anyshing Bureacracy, The Five Strategies for Reinventing Gornment*, Addison – Wesley Publising Company Inc.
- Pakpahan, Muchtar, 1994, DPR RI, *Semasa Orde Baru*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Pamudji, S., 1994, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
- Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cam Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010.
- Prawirosentono, Suyadi, 1999, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta.
- Putra, Fadillah, 1999, *Devolusi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rasyid, Ryass, M, 1995, *Nasionalisme dan Demokrasi*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 1997 a, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 1997 b, *Makna Pemerintahan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 1997 c, *Pembangunan Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad 21*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 1999, *Pemerintahan yang Amanah*, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta.
- _____, 2001, *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan; Pustaka Kajian Etika Poligik dan Pemerintahan (PUSKAP)*, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara 3848.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan penjelasannya,
- Republik. Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Rinehart, Holt and Wiston, 1961, *Democracy in Theory and Practice*, New York, USA.
- Riwukano, Josep, dkk, 1997, *Kapita Selektta Masalah-masalah Pemerintah*.
- Rosen, Bernard, 1998, *Holding Government Bureaucracies Accountable*, 3rd Edition, Praeger Publishers Westport, USA.
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1997, *Partai, Pemuli dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Scott Greer, Ronald D. Hedlund, James Gibson, 1978, *Accountability in Urban Society; Public Agencies Under Fire Publication* : Beverly Hills.

- Siagian, Sondang P, 1995, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Gunung Aping, Jakarta.
- Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Soepeno, Bambang, 1997, *Statistik Terapan dalam Ilmu-ilmu sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia WI Press).
- _____, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Karya Grafindo Persada.
- _____, 2000, *Kuasa dan Moral Legitimasi Kekuasaan*, Gramedia Pustaka, Umum, Jakarta.
- Sprio, Herbert J, 1969, *Responsibility in Government*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suny, Ismail, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Aksara Baru, Jakarta.
- Suryakusuma, Julia I, 2000, *Badan Legislatif dalam Era Reformasi 1998-2001*, dalam Panduan Parlemen Indonesia, Yayasan API, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1994, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syaukani, dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.